



EXCECUTIVE SUMMARY

PENYUSUNAN KAJIAN PEMULIHAN DAERAH PASCA COVID-19



chaakraconsulting



chaakraconsulting.com

Executif Summary

KAJIAN PEMULIHAN DAERAH PASCA COVID-19

PENDAHULUAN

Kemunculan *Corona Virus Disease* 2019 atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 pada awal tahun 2020 telah menggemparkan dunia. Sejak pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, virus ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Kondisi ini memaksa *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.

Di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, di mana teridentifikasi dua orang terkonfirmasi positif Covid-19 pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan secara resmi menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.

Beberapa daerah bahkan terpaksa menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menghambat laju penularan Covid-19 melalui pembatasan pergerakan orang maupun barang. Pada tanggal 24 Agustus 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia tercatat 155.412 kasus (+ 1.877) yang tersebar di 485 Kabupaten/Kota pada 34 Provinsi. Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua dengan jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 30.635 kasus. data yang dirilis Jatim Tanggap Covid-19, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus paling banyak. Jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebanyak 4.719 kasus.

Dampak di bidang sosial, jumlah pekerja yang mengalami PHK dan dirumahkan selama pandemi Covid-19 semakin meningkat. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang di PHK maupun dirumahkan berdampak pada naiknya angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 tercatat 26,42 juta orang.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak kedua. pemberlakuan PSBB Tahap 1 hingga Tahap 3 guna memutus rantai penyebaran virus.

Data sensus ekonomi 2016 Kabupaten Sidoarjo memiliki usaha produktif sebanyak 206.934 perusahaan. Usaha produktif tersebut menyerap 1.613.673 tenaga kerja yang dikategorikan sebagai usaha mikro sebanyak 181.961. Usaha kecil sebanyak 19.958 perusahaan, usaha menengah sebanyak 4.444 perusahaan dan usaha besar sebanyak 571 perusahaan.

Maka diperlukan sebuah kajian yang bertujuan untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk membantu Pemda Kab. Sidoarjo dan praktisi dalam mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk menanggapi dampak pandemi yang sedang berlangsung pada usaha produktif. Maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo dirasa perlu untuk melakukan kajian Pemulihan kondisi perekonomian Daerah Pasca Covid-19.

TUJUAN

Tujuan dalam kajian Pemulihan Daerah Pasca Covid-19 antara lain:

1. Mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo baik dari sisi usaha maupun tenaga kerja.
2. Merumuskan kebijakan strategis pemulihan daerah pasca Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo.
3. Mengetahui kemampuan bertahan Warga Kabupaten Sidoarjo pasca Covid-19.
4. Mengetahui waktu yang dibutuhkan pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo untuk kembali pada kondisi normal sebelum pandemi Covid-19.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Usaha Produktif Akibat Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo

a. Gambaran Umum Usaha Produktif Akibat Covid-19

Dampak covid-19 terhadap masyarakat dan perekonomian dapat disaksikan mulai dari pengeluaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kajian ini melakukan eksplorasi data melalui survei sebanyak 755 usaha produktif yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mereka. Selain itu, akibat kebijakan PSBB menyebabkan penurunan permintaan yang cukup signifikan menyebabkan sebagian besar usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo mengalami masalah terhadap *cash flow* karena hilangnya arus pelanggan atau pembeli.

b. Pemetaan Sektor Yang Paling Terdampak Covid-19

Di tengah kondisi Pandemi Covid-19, banyak perusahaan berupaya untuk tetap mempertahankan operasional usahanya. Pembatasan mobilitas warga juga berpengaruh pada beberapa sektor-sektor yang mengalami penurunan pendapatan, dimana sektor – sektor tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja dan mempunyai mobilitas pekerja yang padat. Sebaliknya, Sektor Informasi dan komunikasi, sektor pertanian dan sektor jasa kesehatan mengalami peningkatan kinerja yang baik. Penerapan kebijakan *work from home* (WFH) dan penerapan *physical distancing* meningkatkan ketergantungan warga Sidoarjo terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sektor pertanian juga mengalami dampak positif pada saat masa pandemic disaat masa penerapan PSBB, sektor pertanian didorong oleh pemerintah selancar mungkin agar *supply* makanan tidak terganggu selama masa peneraan PSBB. Untuk sektor kesehatan, meningkatnya permintaan produk dan layanan kesehatan mendorong sektor ini bekinerja baik selama masa penerapan PSBB dan pandemi Covid-19.

2. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo

Kebijakan PSBB, penerapan *physical distancing*, penutupan sekolah, pembatasan perjalanan dan beberapa kebijakan lain, tidak hanya berdampak pada usaha produktif saja, tetapi juga berdampak pada tenaga kerja di Kabupaten Sidoarjo. Karena kebijakan perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo memilih opsi pengurangan jam kerja bagi perusahaan yang masih beroperasi tanpa melakukan PHK kepada karyawan. Bagi perusahaan yang tidak mampu menanggung beban operasional perusahaannya dimasa

pandemic Covid-19 ini memilih opsi pemberhentian pekerja sementara dalam jangka waktu tertentu dan opsi untuk merumahkan pekerja tanpa dibayar.

Untuk perbandingan usaha menengah - besar relatif lebih banyak melakukan pengurangan pegawai daripada usaha mikro - kecil dengan alasan : Pertama, beban upah per pekerja lebih mahal untuk usaha menengah-besar daripada usaha mikro - kecil. Kedua, biaya produksi tetap lebih besar dari usaha menengah-besar daripada usaha mikro - kecil. Ketiga, jumlah tenaga kerja lebih besar usaha menengah-besar daripada usaha mikro - kecil. Dampak pandemi Covid-19 sebetulnya banyak dirasakan oleh tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan skala besar, menengah, usaha kecil dan usaha mikro.

3. Permasalahan Yang Dihadapi Akibat Covid-19

a. Perubahan Omset Selama Pandemi Covid-19

Pembatasan mobilitas orang selama masa pandemi Covid-19 menyebabkan orang-orang tidak lagi bebas melakukan aktifitas ekonomi. Hal ini juga berdampak pada omset pada usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo, dimana omset merupakan pintu masuk dari ketahanan suatu usaha atau bisnis dan omset sangat tergantung dari seberapa banyak barang dan jasa yang berhasil di jual. Artinya jika barang dan jasa yang dijual mengalami penurunan, maka ketahanan usaha atau bisnis juga terganggu. Di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan omset selama masa pandemi covid-19 dibandingkan dengan situasi normal. Penurunan omset penjualan ini tidak hanya dirasakan oleh usaha menengah-besa, usaha mikro dan kecil juga merasakan.

Sektor yang paling parah mengalami penurunan omset adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, Diurutan kedua sektor pendidikan merupakan sektor yang juga mengalami penurunan omset cukup besar. Dan sektor Kesehatan, Pertanian serta sektor informasi dan komunikasi tumbuh positif selama masa pandemi Covid-19. Dan disektor Transportasi, Manufaktur dan sektor jasa lainnya mengalami penurunan omset, hal ini membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan ekonomi (minus).

Pada tanggal 08 Juni 2020 dicabutnya kebijakan PSBB kondisi perekonomian Kabupaten Sidoarjo mulai mengalami *recovery* namun belum bisa kembali pada kondisi perekonomian sebelum pandemi covid-19 tapi untuk omset Pendapatan untuk usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro mulai meningkat sedikit demi setelah kebijakan PSBB dicabut.

b. *Survival Period* Usaha Produktif Di Kabupaten Sidoarjo

Pengertian *survival period* dalam penelitian ini memiliki arti yang berbeda, yaitu seberapa lama usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo ini mampu bertahan jika kondisi pandemic covid-19 ini tidak membaik atau tidak berubah. Untuk kembali ke kondisi normal rata-rata usaha mikro-kecil lebih cepat mengalami *recovery* dibandingkan dengan usaha menengah-besar. Menurut hasil survey kondisi perekonomian Kabupaten Sidoarjo akan pulih dalam 6-12 bulan kedepan. Ada 3 sektor memiliki optimisme paling tinggi terhadap pemulihan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Sektor tersebut adalah sektor pendidikan, konstruksi & properti serta sektor jasa keuangan, dimana usaha produktif di sektor ini menyakini bahwa perekonomian kabupaten Sidoarjo akan kembali normal dalam 6-12 bulan kedepan.

c. Kendala Yang Muncul Akibat Covid-19

Secara khusus problem utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo adalah menurunnya permintaan penjualan yang menyebabkan kerugian materil dan non-materil, sulitnya melakukan penjualan, usaha produktif kesulitan dalam membayar gaji pegawai, Mendapat Bahan Baku, Biaya Operasional.

Dampak pandemi Covid-19 membuat seluruh usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo, baik mikro-kecil dan menengah-besar mengalami penurunan permintaan dan kesulitan dalam menjual produknya. Untuk usaha menengah-besar masih dimudahkan dengan sumber daya yang cukup dan akses ke sumber daya keuangan. Untuk usaha mikro-kecil kesulitan dalam mendapatkan bahan baku yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis mereka.

d. Strategi Yang Dilakukan Untuk Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19

Usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo memilih berbagai macam strategi agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 yaitu dengan menutup sementara (*shut down*), mengurangi pegawai, merubah bisnis model, mengurangi jam kerja. Perbedaan strategi dominan yang dilakukan antara usaha mikro-kecil dengan usaha menengah-besar. Untuk usaha mikro-kecil dikarenakan dari sisi sumber daya terbatas baik dari SDM, untuk masalah keuangannya usaha mikro – kecil digunakan strategi dengan cara mengurangi pegawai, mengurangi jam kerja dan menutup usaha sementara. Untuk usaha bisnis menengah-besar, mereka mempunyai sumber daya yang relatif baik maka strateginya melakukan restrukturisasi kredit, kemudian mengurangi pegawai dan mengurangi jam kerja.

4. Ekspektasi Perekonomian Kabupaten Sidoarjo

1. Ekspektasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo

Pemkab Sidoarjo memiliki informasi yang lebih baik terkait perumusan strategi pemulihan ekonomi Kabupaten Sidoarjo. Ekspektasi publik merupakan salah satu instrumen yang penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Jika ekspektasi publik ini dapat dijangkar dengan baik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo akan mengarah di sekitar yang ditargetkan. Berdasarkan hasil survey, rata-rata ekspektasi usaha produktif terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo adalah berkisar antara 1-3%. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo di tahun 2021 adalah berkisar antara 4-5%. Sedangkan hanya 10% yang berekspektasi optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 bisa tumbuh lebih dari 5%.

2. Ekspektasi Inflasi Kabupaten Sidoarjo

Inflasi merupakan biaya ekonomi (*cost of economic*) yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikendalikan. Dikarenakan Indonesia menganut kebijakan *inflation targeting framework* (ITF) untuk mengendalikan inflasi. Maka, inflasi jangka panjang lebih penting jika dibandingkan dengan inflasi jangka pendek. Jadi, bagi pemerintah daerah, harga komoditas yang banyak dikonsumsi untuk mengetahui informasi tentang ekspektasi inflasi publik pada jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan hasil survey, ekspektasi inflasi Kabupaten Sidoarjo untuk usaha mikro – kecil dan usaha bisnis menengah – besar berkisar antara 1-3%. Inflasi kabupaten Sidoarjo di tahun 2021 berekspektasi optimis bahwa akan terjadi *hyper inflasi* lebih dari 5%.

5. Dukungan Yang Diperlukan Usaha Produktif

Mengingat kompleksnya permasalahan, maka diperlukan program dukungan yang mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Tujuan dari berbagai program tersebut adalah mendorong kembali usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo agar dapat pulih lebih cepat di masa transisi. Secara umum terdapat perbedaan dukungan kebijakan yang diperlukan antara perusahaan mikro-kecil dengan perusahaan menengah-besar dari Pemda Kabupaten Sidoarjo. Untuk dukungan kebijakan perusahaan mikro-kecil, kredit modal dengan suku bunga rendah, pendampingan penguasaan marketing online dan perluasan pelibatan lelang barang dan jasa. Untuk dukungan kebijakan perusahaan,

mendukung kebijakan relaksasi pembayaran pinjaman, penundaan pembayaran pajak dan tidak menaikkan UMK.

Selain program kebijakan faktor keberhasilan yang tak kalah pentingnya adalah masalah komunikasi kepada dunia usaha yang sudah dirancang. Seperti Kebijakan stimulus misalnya pembebasan retribusi pasar, pembebasan denda dan pengurangan pajak daerah maupun pembebasan tunggakan retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB). Dengan informasi program stimulus Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo akan menciptakan keberhasilan stimulus dan percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

6. Roadmap Kebijakan Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah

Berdasarkan hasil temuan studi ini, langkah-langkah kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah ada 3 strategi, yaitu Strategi jangka pendek, strategi jangka menengah dan strategi jangka panjang. Secara khusus kebijakan yang akan diambil menjai 5 (lima) kategori sebagai berikut :

- Mendorong Keuangan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo
- Mendorong dan Meningkatkan Kapabilitas Usaha Produktif
- Perbaikan Iklim Bisnis
- Akselerasi Adopsi Teknologi
- Akselerasi Produktifitas Tenaga Kerja

Untuk Kebijakan jangka pendek adalah mendorong keuangan inklusif dengan cara memberikan bantuan kredit berbunga rendah pada usaha mikro dan kecil. Untuk usaha menengah-besar, kebijakan jangka pendek yang bisa dilakukan adalah menurunkan tarif pajak dan retribusi daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Selanjutnya, kebijakan jangka menengah, dilakukan untuk meringankan beban usaha menengah-besar adalah memberikan subsidi upah untuk pekerja yang dipekerjakan kembali dalam kurun waktu tertentu. agar mereka memperkejakan kembali warga Sidoarjo yang sempat ter-PHK akibat pandemi Covid-19. Dengan kategori akselerasi adopsi teknologi dapat melakukan perbaikan infrastruktur IT, agar usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan *digital shifting* secara cepat dan lancar untuk beradaptasi di era *new normal*. Untuk kebijakan perbaikan iklim bisnis jangka menengah perlu mereview/mengkaji ulang aturan-aturan yang menghambat dunia usaha di Kabupaten Sidoarjo. Pada kebijakan perbaikan iklim bisnis, usaha bisnis besar menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi dan untuk usaha kecil, mikro dan menengah menyumbangkan nilai tambah yang cukup kecil. Dimana beban biaya regulasi per unit produk relatif kecil bagi usaha besar dibanding usaha mikro, usaha kecil dan

menengah. Berdasarkan ini, usaha dan kebijakan mengurangi beban regulasi perlu menjadi prioritas jangka menengah agar percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

Pada strategi kebijakan mendorong keuangan inklusif, untuk mendistrupsi pembiayaan bagi usaha produktif yang tidak bankable. Jangkah menengah Pemkab Sidoarjo bisa memperbesar akses kredit ke lembaga keuangan dengan jalan mengembangkan produk dan layanan keuangan kredit daerah yang bekerjasama dengan bank umum atau BPR Delta Arta. Hal ini untuk mendorong agar para usaha mikro-kecil maupun menengah dapat lebih besar mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan formal. Selanjutnya untuk strategi jangka panjang mendorong BPR Delta Arta agar dapat mengadopsi teknologi pembiayaan digital dan mengundang perusahaan *fintech* agar mendirikan kantor perwakilannya di Kabupaten Sidoarjo.

Pada Selanjutnya strategi mendorong dan meningkatkan kapabilitas usaha produktif dalam jangka menengah adalah mengintensifkan pelatihan dan memfasilitasi sertifikasi produk/usaha, agar produk-produk dari usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo memiliki daya saing dengan produk- produk dari daerah lain maupun produk internasional. Untuk strategi jangka panjang, Pemkab Sidoarjo perlu memperkuat *channeling* pasar bagi produk-produk usaha produktif Kabupaten Sidoarjo ke seluruh wilayah Indonesia maupun pasar internasional.

Pada strategi akselerasi adopsi teknologi dalam jangkah menengah adalah melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk membangun *business attitude* terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk strategi jangka panjang, perlu membangun infrastruktur Big Data dan mendorong pemanfatannya bagi dunia usaha, agar kemampuan inovasi produk dan manajerial usaha produksi di Kabupaten Sidoarjo tidak tertinggal dengan para pesaingnya.

Selanjutnya strategi jangka menengah akselerasi produktifitas tenaga kerja adalah melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja yang dipekerjakan kembali agar untuk meningkatkan *skill, knowledge* dan *attitude* (SKA) pekerja agar lebih produktif. Selanjutnya dalam jangka panjang, Perkembangan pesat ilmu pengetahuan sebagai sumber perkembangan teknologi menghasilkan teknologi yang bersifat *skill biased*, terutama ketrampilan di bidang teknologi digital. Sehingga Pemkab perlu membangun *science technopark* sebagai penyedia *supply* tenaga kerja yang memiliki *skill* teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka kesimpulan dari kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kasus penularan Covid-19 masih terus meningkat dan belum menunjukkan tanda menurun.
2. Dampak pelaku usaha produktif (Mikro, Kecil, Menengah dan Besar) pada masa pandemi Covid-19
 - selama masa PSBB diberlakukan, mayoritas usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan omset dibandingkan kondisi normal (1 Oktober-31 Desember 2019).
 - Selama masa kebijakan PSBB hanya 4 usaha produktif dari 10 usaha produktif beroperasi seperti biasa.
 - usaha bisnis besar-menengah melakukan pemutusan hubungan kerja, sedangkan untuk usaha mikro-kecil hanya melakukan pemutusan hubungan kerja selama periode Maret-September 2020.
 - usaha produktif di Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah pengurangan jam kerja untuk tidak mengurangi PHK bagi tenaga kerja selama periode Maret-September 2020.
3. Tingkat *survival period* pada usaha produktif selama masa pandemi Covid-19 :
 - Survival period untuk usaha mikro-kecil rata-rata adalah 1-3 bulan jika kondisi pandemi Covid-19 tidak membaik.
 - Survival period untuk usaha menengah rata-rata adalah 3-6 bulan jika kondisi pandemi Covid-19 tidak membaik.
 - Survival period untuk usaha besar rata-rata lebih dari 6-12 bulan jika kondisi pandemi Covid-19 tidak membaik.
4. Ekspektasi pelaku usaha terhadap waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke kondisi normal adalah :
 - Untuk usaha mikro-kecil waktu recovery agar kembali ke kondisi normal sekitar 1-3 bulan jika kondisi pandemi Covid-19 menunjukkan perbaikan yang konstan.
 - Untuk usaha menengah waktu recovery agar kembali ke kondisi normal sekitar 4-6 bulan jika kondisi pandemi Covid-19 menunjukkan perbaikan yang konstan.
 - Untuk usaha besar waktu recovery agar kembali ke kondisi normal sekitar 6-12 bulan jika kondisi pandemi Covid-19 menunjukkan perbaikan yang konstan.

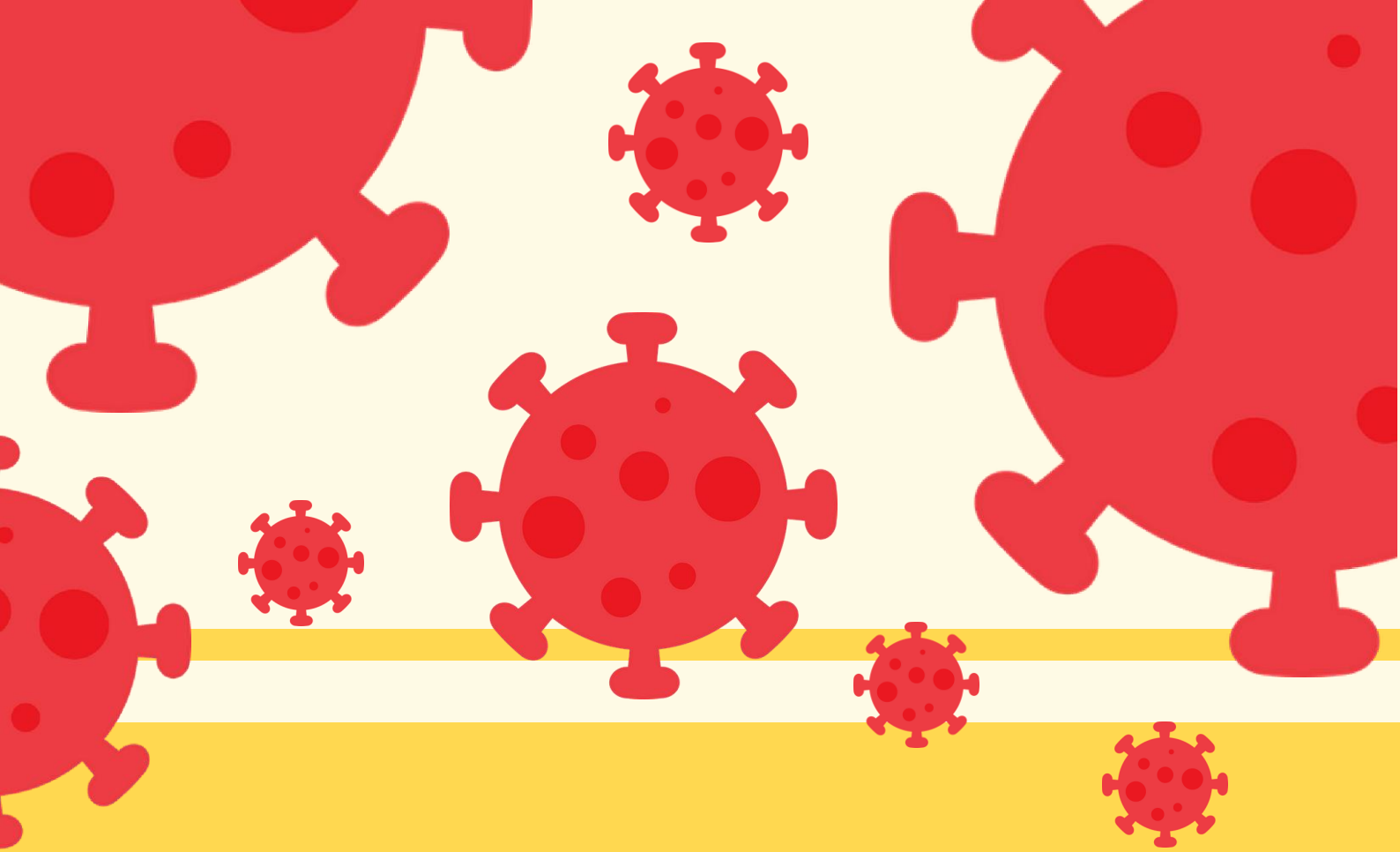
- Ekspektasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menurut usaha produktif di tahun 2021 berkisar antara 1%-3%.
5. Kebijakan yang perlu diambil oleh Pemkab Sidoarjo untuk mempercepat pemulihan ekonomi Kabupaten Sidoarjo adalah :
- Pemkab Sidoarjo perlu untuk mengambil kebijakan tidak hanya berfokus pada jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan jangka panjang.
 - kebijakan stimulus Pemkab Sidoarjo untuk usaha mikro-kecil yaitu: kredit berbunga rendah, pelibatan dalam lelang barang, peningkatan akses keuangan, promosi/pemasaran produk pasar digital dan jasa pendampingan pemanfaatan marketing online.
 - Kebijakan Pemkab Sidoarjo untuk usaha menengah-besar yaitu: relaksasi pembayaran kredit, tidak menaikkan upah minimum dan sektoral, melakukan subsidi upah bagi pekerja warga Sidoarjo yang telah dipekerjakan kembali.

Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka saran dari kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemkab Sidoarjo hendaknya memperbesar dana alokasi untuk pemulihan ekonomi
2. Melakukan perbaikan iklim bisnis di Kabupaten Sidoarjo dalam jangka pendek, untuk jangka menengah adalah melakukan *review* peraturan kebijakan daerah yang menghambat dunia usaha. Untuk jangka panjang membangun sistem perijinan sederhana, dan meleakukan perubahan paradigma perijinan dari pemberian lisensi menjadi perijinan registrasi.
3. Mendorong keuangan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Untuk jangka pendek memberikan bantuan kredit berbunga rendah. Untuk jangka menengah yaitu memperbesar akses kredit ke lembaga keuangan agar lebih mengembangkan produk dan layanan keuangan kredit pemerintah daerah. Untuk jangka panjang mendorong lembaga keuangan untuk mengabdopsi teknologi pembiayaan digital serta mengundang perusahaan *fintech* untuk mendirikan kantor perwakilan di Kabupaten Sidoarjo.
4. Mendorong dan meningkatkan kapabilitas usaha produktif. Untuk jangka pendek melakukan penurunan tarif pajak dan retribusi daerah. Untuk jangka menengah mengintensifkan pelatihan dan memfasilitasi sertifikasi produk/usaha. Untuk jangka panjang Pemkab Sidoarjo perlu memperkuat *channeling* pasar bagi produk-produk usaha produktif Kabupaten Sidoarjo ke seluruh wilayah Indonesia maupun pasar internasional.

5. Mendorong akselerasi adopsi teknologi. Untuk jangka pendek adalah melakukan perbaikan infrastruktur IT. Untuk jangka menengah melakukan pelatihan dan sertifikasi untuk membangun *business technology attitude* terhadap para pelaku usaha bisnis menengah – besar dan usaha bisnis mikro – kecil. Jangka panjang membangun infrastruktur Big Data dan mendorong pemanfaatannya bagi dunia usaha.
6. Mendorong akselerasi produktifitas tenaga kerja. Untuk jangka pendek adalah memberikan subsidi upah ke perusahaan menengah-besar yang memperkejakan kembali warga Sidoarjo. Untuk jangka menengah adalah meningkatkan *skill, knowledge* dan *attitude* (SKA) pekerja agar lebih produktif. Untuk jangka panjang Pemkab perlu membangun *science technopark* sebagai penyedia *supply* tenaga kerja yang memiliki *skill* teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



chaakraconsulting



chaakraconsulting.com